



### **1.1 Latar Belakang**

Pembangunan ekonomi secara nasional di era persaingan global yang kompetitif menuntut peran serta dari multisektoral pemerintahan. Hal ini mendasari bahwa persaingan global yang dihadapi oleh pemerintah Republik Indonesia pada selanjutnya membawa pemerintah daerah baik ditingkat provinsi maupun kabupaten serta kota dituntut secara kolektif mendorong kapasitas ekonomi regional untuk lebih melakukan terobosan guna tercapainya kesejahteraan masyarakat. Didalam usaha terobosan peningkatan kesejahteraan masyarakat ini, pemerintah dibekali dengan kewenangan yang dituangkan dalam prinsip pelaksanaan otonomi daerah. Melalui prinsip desentralisasi dan otonomi daerah memberikan keleluasaan bagi pemerintah daerah melalui kewenangannya untuk melakukan inovasi guna percepatan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi lokal. Saat ini pemerintah daerah tidak hanya sebagai representatif dari pemerintahan secara nasional tetapi dengan prinsip desentralisasi administratif maka penyelenggaraan pemerintahan daerah juga memperhatikan kondisi lokal guna penyediaan *public good* (barang publik) dan juga *services* (pelayanan).

Untuk terus mendorong penguatan kapasitas pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan publik maka pemerintah melalui Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah, Pasal 29 Ayat 5 secara tegas memaktubkan tentang percepatan pembangunan ekonomi ditingkat daerah disusun melalui strategi percepatan pembangunan daerah. Hal ini tidak lain untuk mewujudkan juga *Reinventing Government* yang juga menyasar kepada tata kelola pemerintahan yang baik khususnya pada bidang

pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi daerah selanjutnya pada pasal 36 ayat 1 huruf e Undang-undang 23 tahun 2014 juga menjelaskan urgensi potensi ekonomi suatu daerah yang menjadi tolak ukur bagi kapasitas daerah. Pada pasal 36 ayat 6 dijelaskan juga Parameter potensi ekonomi meliputi: (a) pertumbuhan ekonomi dan (b) potensi unggulan Daerah. Bertalian dengan hal tersebut untuk melihat pertumbuhan ekonomi daerah dapat dilakukan dengan melihat kepada Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Instrumen PDRB merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah dalam suatu periode tertentu, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. Selain daripada itu PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi pada suatu daerah.

Peningkatan secara kuantitatif angka pertumbuhan ekonomi nasional mesti diiringi dengan lonjakan kualitas kontribusi nyata baik sektoral maupun sektoral dari pergerakan ekonomi lokal secara signifikan. Gambaran pertumbuhan ekonomi dapat memberikan informasi kepada publik perkembangan ekonomi terkini setiap tahunnya. Data ini berguna bagi peningkatan koordinasi lintas sektor pemerintah untuk menyusun kebijakan strategis untuk urusan ekonomi.

Kebijakan ekonomi daerah salah satunya dilihat dari instrumen Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) menjadi tolak ukur secara makro berimplikasi dengan pelaksanaan pembangunan wilayah. Dengan data PDRB dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pertumbuhan ekonomi suatu wilayah yang kemudian secara periode tahunan dihitung berdasarkan harga berlaku dan dasar harga konstan. Todaro dan Smith (2008) menjelaskan bahwa ciri dari pertumbuhan ekonomi lokal wilayah semakin baik dapat dilihat dari laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan. Disamping itu pertumbuhan ekonomi yang tinggi disertai dengan pemerataan hasil

pembangunan menjadi sasaran yang utama dan ini merupakan ciri keberhasilan dalam pembangunan ekonomi (Andhiani, K. D., Erfit, E., & Bhakti, A., 2018). Pertumbuhan ekonomi mesti juga memperhatikan prinsip-prinsip keadilan sebagaimana amanat Pancasila yang memuat akan ekonomi kerakyatan tentunya harus jadi perhatian utama untuk pemerataan kondisi perekonomian lokal sehingga memperkecil ketimpangan persoalan sosial-ekonomi ditengah-tengah masyarakat.

Kabupaten Bintan dalam pembangunan daerah terus memperhatikan peningkatan ekonomi regionalnya hal ini dilakukan untuk membangun kesejahteraan daerah serta ekonomi berdikari dan mandiri di era otomi daerah. Ini penting untuk percepatan kemajuan pertumbuhan wilayah sekaligus menekan kesenjangan antar wilayah di Kabupaten Bintan. Berkaitan dengan hal tersebut pemerintah Kabupaten Bintan telah melakukan sederet usaha salah satu persoalan penting yang digesa adalah peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah. Usaha yang telah dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini pemerintah Kabupaten Bintan salah satunya ditunjukkan dengan pencapaian yang terdapat pada Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) tahun 2017 pada sektor-sektor ekonomi lokal ditunjukkan dengan keberhasilan laju angka pertumbuhan ekonomi yaitu sebesar 6,17 % (persen) pada tahun 2017 bahkan untuk pendapatan daerah melebihi target awal dengan realisasi hingga lebih dari Rp 1 triliun. Hal ini merupakan sinyal positif terhadap kondisi ekonomi daerah khususnya Kabupaten Bintan, karena jika melihat kembali Laporan Statistik Bintan dalam angka tahun 2015 dan tahun 2016 maka angka pertumbuhan ekonomi pada tahun 2015, 6 persen lebih, dan 2016 di angka 5 persen lebih (BPS Kabupaten Bintan; 2015,2016).

Akan tetapi penting juga dilihat bahwa apakah angka pertumbuhan ekonomi yang meningkat tersebut memberikan efek riil kondisi sosial- ekonomi masyarakat. Pertumbuhan ekonomi yang signifikan semestinya dibarengi dengan kualitas hidup masyarakatnya, oleh sebab itu menurut Kuncoro Mudrajat (2004) bahwasanya

pertumbuhan ekonomi menurut beliau diyakini mendorong pemerintah daerah untuk melakukan pembangunan ekonomi dengan mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan dengan masyarakat untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru yang akan mempengaruhi perkembangan kegiatan ekonomi dalam daerah tersebut. Bachtiar (2015:1) dalam kajiannya tentang pembangunan ekonomi menjelaskan bahwa Salah satu indikator tercapainya suatu pembangunan daerah adalah pertumbuhan ekonomi

yang terus meningkat kearah signifikan. Dengan artian bahwa pertumbuhan ekonomi dapat terus meningkat seiring dengan perbaikan - perbaikan yang ada pada sektor pendorong ekonomi dan impaknya pada ukuran keberhasilan pembangunan daerah juga dinilai dari kemampuan daerah tersebut untuk mencukupi kebutuhan masyarakatnya dan mengembangkan segala potensi yang ada

Urgensi telaah terhadap kondisi terdahulu dan eksisting pertumbuhan ekonomi ditingkat daerah memiliki relasi erat bagi penyusunan perencanaan kedepan. Ini juga akan berimplikasi untuk kerangka ekonomi daerah sebagai bagian dari perencanaan pembangunan daerah serta informasi pembangunan yang memuat kondisi ekonomi daerah. Sehubungan dengan fenomena-fenomena diatas maka menjadi landasan berpikir bahwa perlu adanya telaah informasi terhadap kondisi makro ekonomi daerah Kabupaten Bintan melalui Produk Domestik Bruto Regional yang berguna untuk catatan historisitas dan juga untuk perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Bintan khususnya dibidang ekonomi.

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Pertumbuhan Ekonomi berdasarkan PDRB selama 3 tahun (tahun 2015-2017) di Kabupaten Bintan ?
2. Sektor basis ekonomi apa yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi wilayah Kabupaten Bintan ?
3. Apa saja dampak pengganda pendapatan dari kegiatan sektor ekonomi yang menjadi sektor unggulan di Kabupaten Bintan ?

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Adapun maksud dan tujuan dari penyusunan analisa pertumbuhan ekonomi kabupaten bintan adalah sebagai berikut:

#### **1.3.1 Maksud**

Melalui penyusunan Analisa Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bintan dimaksudkan untuk menganalisa pertumbuhan Ekonomi berdasarkan PDRB dan langkah-langkah yang tepat oleh Pemerintah Daerah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bintan.

#### **1.3.2 Tujuan**

Sedangkan Tujuan dari kegiatan penyusunan analisa indicator pertumbuhan ekonomi daerah kabupaten Bintan ini adalah :

1. Menganalisa Pertumbuhan Ekonomi berdasarkan PDRB selama 3 tahun (tahun 2015-2017) di Kabupaten Bintan.
2. Menganalisa sektor basis ekonomi yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi wilayah Kabupaten Bintan.
3. Menganalisa dampak pengganda pendapatan dari kegiatan sektor ekonomi yang menjadi sektor unggulan di Kabupaten Bintan.
4. Memberikan gambaran Kondisi Ekonomi Kabupaten Bintan pada tahun 2017

### **1.4 Ruang Lingkup**

Untuk lebih memfokuskan arah dari kajian ini maka diperlukan pula pembatasan pembahasan ruang lingkup agar hasil yang diinginkan lebih komprehensif. Maka kajian ini melihat bagaimana pertumbuhan ekonomi berdasarkan PDRB dari (tahun 2015- 2017 di Kabupaten Bintan dan menganalisa sektor basis ekonomi yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi wilayah.

